



DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN SIMEULUE (Studi Kasus Di Kecamatan Alafan)

Leli Putri Ansari¹, Harmaini², Zul Rahmad Atami³

¹ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Teuku Umar, leliputriansari@utu.ac.id

² Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Teuku Umar, harmaini@utu.ac.id

³ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Teuku Umar, zulrahmadatami14@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Received: 2025-12-01
Revised: 2025-12-25
Accepted: 2026-01-06
Available online: 2026-02-14

KEYWORDS

Dinas Sosial, Anak Putus Sekolah, Kecamatan Alafan, Human Capital Theory

CORRESPONDENCE

E-mail: zulrahmadatami14@gmail.com

ABSTRACT

The issue of school dropout children is a significant social issue in Alafan District, Simeulue Regency, which has the potential to increase poverty and social inequality. This study aims to analyze the causal factors, roles, and efforts of the Social Service in handling school dropout children in the research location. The method used is qualitative descriptive with purposive sampling technique. The results show that the causal factors of school dropout are multidimensional, including economic, socio-cultural, educational facilities, as well as environmental and child motivation factors. The role of the Social Service is not limited to material assistance, but includes empowerment, coaching, and cross-sector collaboration. Prevention efforts include data collection, social assistance, family empowerment, counseling, and collaboration. The conclusion of the study emphasizes the importance of a comprehensive and sustainable approach in reducing the dropout rate.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap Warga Negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 Ayat (1). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak yang tidak dapat menikmati hak tersebut akibat dari berbagai permasalahan yang kompleks. Banyak anak putus sekolah merupakan masalah sosial dan pedagogis serius yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan data yang ada, jumlah anak putus sekolah di Indonesia masih signifikan dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Di Kabupaten Simeulue, khususnya di Kecamatan Alafan, masalah anak putus sekolah juga menjadi perhatian khusus. tercatat pada tahun

2023, sebanyak 17 anak terdata putus sekolah, suatu angka yang cukup memprihstinkan. Fakto-Fakto penyebabnya pun kompleks dan beragam, mulai dari ekonomi keluarga yang lemah, minat belajar yang rendah; kurangnya perhatian dari orang tua, lingkungan yang kurang mendukung, hingga jarak tempuh ke sekolah yang jauh. kondisi ini memerlukan penanganan yang komprehensif dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap anak dapat memperoleh pendidikan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Kecamatan Alafan ;(2) Menganalisis peran Dinas Sosial dalam penanganan anak putus Sekolah;(3) Mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mencegah terjadinya kasus anak putus sekolah di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak di Kecamatan Alafan.

2. TINJAUAN PUSTAKA / PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Anak putus sekolah didefinisikan sebagai mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Dampaknya bersifat individu (kesulitan mendapat pekerjaan) dan sistemik (menghambat pertumbuhan daerah). Penyebab putus sekolah bersifat multifaktor, antara lain: (1) Faktor Ekonomi: Ketidakmampuan keluarga menanggung biaya pendidikan; (2) Faktor Sosial Budaya: Anggapan pendidikan tidak penting, pernikahan dini, dan anak sebagai tenaga kerja; (3) Faktor Pendidikan dan Lingkungan: Kualitas sekolah rendah, jarak sekolah jauh, bullying, dan kurangnya motivasi belajar.

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan kesejahteraan sosial. Fungsinya meliputi rehabilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Teori Modal Manusia (Schultz & Becker) memandang pendidikan sebagai investasi dalam sumber daya manusia yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan di masa depan. Dalam konteks ini, anak putus sekolah merepresentasikan terhambatnya proses investasi modal manusia. Intervensi sosial dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki kalkulasi biaya-manfaat pendidikan di tingkat keluarga dan memastikan akumulasi "modal pengetahuan" berjalan.

3. METODEDE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan empat informan kunci di Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (Kepala Dinas, Kabid, dan Kasi terkait) serta 17 responden anak putus sekolah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Responden dan Karakteristik Anak Putus Sekolah

Berdasarkan data primer yang diolah, karakteristik anak putus sekolah di Kecamatan Alafan dapat diidentifikasi dari segi usia dan faktor dominan yang menyebabkan mereka putus sekolah.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	≤ 10	3	17.65

No	Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
2	11 - 15	10	58.82
3	16 - 20	4	23.53
Total		17	100

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas anak putus sekolah (58,82%) berada pada kelompok usia 11-15 tahun, yang merupakan usia kritis untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Temuan ini sejalan dengan penelitian Riswan et al. (2022) di Kabupaten Simeulue yang juga menemukan kerentanan tinggi pada transisi pendidikan, dimana faktor eksternal seperti ekonomi keluarga dan perhatian orang tua menjadi penentu utama.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Faktor Penyebab

No	Faktor Penyebab	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Faktor Ekonomi	14	82
2	Faktor Lingkungan	2	12
3	Faktor Personal	1	6
Total		17	100

Tabel 2 secara tegas mengonfirmasi bahwa faktor ekonomi adalah penyebab utama (82%) anak putus sekolah di Kecamatan Alafan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Sosial, Bapak T. Riduan: *"Permasalahan anak putus sekolah di Kecamatan Alafan disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang masih rendah. Banyak orang tua bekerja sebagai nelayan dan petani dengan penghasilan tidak menentu, sehingga pendidikan anak tidak menjadi prioritas utama.* Temuan ini konsisten dengan penelitian Budi Lestari et al. (2020) dan Alifa (2023) yang menegaskan bahwa kemiskinan dan ketidakmampuan finansial orang tua merupakan pendorong utama anak keluar dari sistem pendidikan.

4.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah secara Kualitatif

Dari hasil wawancara mendalam, teridentifikasi beberapa faktor penyebab yang saling berkaitan:

1. Tekanan Ekonomi Keluarga yang Akut: Selain ketiadaan biaya, munculnya *opportunity cost* dimana anak dianggap lebih produktif dengan membantu orang tua mencari nafkah. Bapak Ramadin menambahkan, *"sebagian anak memilih untuk membantu orang tua bekerja di laut atau di kebun demi menambah penghasilan keluarga."* Fenomena "anak sebagai aset ekonomi" ini juga ditemukan oleh Aminah & Chalid (2023) dalam konteks keluarga nelayan.
2. Persepsi Sosial-Budaya terhadap Pendidikan: Pandangan instrumental terhadap pendidikan, dimana sekolah hanya dianggap penting jika langsung menghasilkan uang. Ibu Irmawaty menyoroti *"kurangnya dukungan orang tua terhadap prestasi anak."* Septianto (2021) menyebut kondisi ini sebagai rendahnya "modal budaya" dalam keluarga.

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Geografis: Jarak tempuh ke sekolah yang jauh dan kondisi transportasi yang sulit menjadi penghalang fisik. Ibu Irmawaty juga menyebutkan *"jarak sekolah dengan tempat tinggal anak cukup jauh, ditambah kondisi transportasi yang terbatas."*
4. Lemahnya Motivasi Intrinsik dan Pengaruh Lingkungan Pergaulan: Bapak Radisal menjelaskan, *"kurangnya motivasi belajar anak sendiri juga menjadi faktor penting... faktor lingkungan pergaulan yang kurang mendukung, seperti teman sebaya yang sudah putus sekolah lebih dulu, turut memengaruhi."* Temuan ini memperkuat penelitian Riswan et al. (2022) tentang pengaruh faktor internal dan eksternal secara simultan.

4.1.3. Peran dan Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan

Peran Dinas Sosial dapat dipetakan ke dalam empat bentuk intervensi utama:

1. Intervensi Finansial Langsung: Bertujuan mengurangi beban biaya langsung pendidikan. Bentuknya meliputi pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan integrasi dengan program nasional seperti PKH dan BPNT. Bapak Ramadin menegaskan, *"tujuan utama dari bantuan tersebut adalah agar keluarga memiliki kemampuan untuk tetap menyekolahkan anak-anak mereka."*
2. Intervensi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga: Strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi. Ibu Irmawaty menjelaskan, *"Dinas Sosial berusaha meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil."*
3. Intervensi Sosial dan Perubahan Perilaku: Melalui penyuluhan dan pembinaan untuk mengubah pola pikir orang tua dan anak. Bapak Ramadin menyatakan pentingnya *"kegiatan pembinaan sosial dan penyuluhan kepada orang tua agar mereka memahami pentingnya pendidikan."*
4. Intervensi Kolaboratif dan Jejaring: Membangun kemitraan strategis. Bapak T. Riduan menekankan, *"peran Dinas Sosial tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan Dinas Pendidikan, pihak sekolah, dan masyarakat."* Bapak Radisal menambahkan pentingnya kerja sama dengan LSM. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan temuan Uncup Supriatna (2023) tentang efektivitas jaringan kerja dalam mengatasi masalah putus sekolah.

4.1.4. Upaya-Upaya Spesifik Pencegahan

Upaya pencegahan bersifat proaktif dan integratif:

1. Pendataan Aktif: Memantau anak yang berisiko putus sekolah.
2. Respons Cepat: Menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan yang teridentifikasi.
3. Pendekatan Kelembagaan: Melibatkan tokoh agama dan adat sebagai agen perubahan sosial.
4. Pendekatan Keluarga: Memandang keluarga sebagai unit intervensi, bukan hanya anaknya saja.

4.2. Pembahasan

4.1.1 Analisis Faktor penyebab anak putus sekolah di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci di Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi akar permasalahan anak putus sekolah di Kecamatan Alafan. Faktor yang paling dominan dan disepakati oleh seluruh narasumber adalah lemahnya kondisi ekonomi keluarga. Seperti yang diuraikan oleh Bapak Ramadin, ketidakmampuan finansial keluarga dalam menanggung biaya pendidikan, baik biaya langsung seperti SPP dan perlengkapan sekolah maupun biaya tidak langsung, menjadi pendorong utama seorang anak memutuskan untuk berhenti sekolah. Selain itu, muncul faktor pendukung lainnya, yaitu rendahnya

kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, sebagaimana diungkapkan dalam upaya pembinaan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Faktor ini semakin diperparah oleh belum optimalnya dukungan lingkungan sosial, di mana peran tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam memotivasi keluarga untuk menyekolahkan anaknya belum sepenuhnya maksimal, seperti yang disinggung oleh Ibu Irmawaty.

Dalam menangani permasalahan ini, Dinas Sosial Kabupaten Simeulue menjalankan peran multipihak yang tidak hanya terfokus pada pemberian bantuan material. Berdasarkan penuturan Bapak T. Riduan, langkah strategis dimulai dengan identifikasi dan pendataan yang melibatkan aparatur kecamatan dan gampong, yang kemudian diverifikasi lebih lanjut seperti dijelaskan Bapak Radisal. Strategi intervensi yang dilakukan dapat dikategorikan ke dalam tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan bantuan sosial langsung berupa beasiswa, bantuan biaya pendidikan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meringankan beban ekonomi keluarga penyebab langsung anak putus sekolah. Kedua, pendekatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil, seperti yang diutarakan Ibu Irmawaty, yang bertujuan meningkatkan kapasitas finansial keluarga secara berkelanjutan. Ketiga, pendekatan pembinaan dan kolaborasi, yang meliputi penyuluhan kepada orang tua, pendampingan terhadap anak, serta membangun kemitraan dengan Dinas Pendidikan, sekolah, lembaga non-pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan pendidikan.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan keselarasan yang erat dengan prinsip-prinsip dasar dalam Human Capital Theory. Teori ini memandang pendidikan sebagai sebuah bentuk investasi modal yang akan memberikan imbal hasil (*return*) berupa peningkatan produktivitas dan pendapatan di masa depan. Dalam konteks ini, fenomena putus sekolah di Kecamatan Alafan merepresentasikan terganggunya proses investasi modal manusia tersebut. Keputusan seorang anak untuk berhenti sekolah, seperti yang diungkapkan oleh para informan, pada dasarnya merupakan hasil dari sebuah kalkulasi biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) yang tidak seimbang di tingkat keluarga. Keluarga memandang biaya pendidikan baik yang bersifat langsung (uang sekolah) maupun tidak langsung (*opportunity cost* karena anak dapat membantu bekerja) lebih besar daripada manfaat jangka panjang yang akan diperoleh.

Interpretasi Program Dinas Sosial Melalui Lensa Human Capital Theory Melalui lensa Human Capital Theory, seluruh program yang dijalankan Dinas Sosial dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memperbaiki kalkulasi biaya-manfaat yang keliru tersebut dan memastikan investasi dalam pendidikan tetap berjalan. Pemberian bantuan sosial langsung (PKH, BPNT, beasiswa) berfungsi secara langsung untuk mengurangi komponen biaya (*cost*) dalam persamaan investasi tersebut. Dengan berkurangnya beban finansial, diharapkan keluarga akan memilih untuk melanjutkan investasi mereka dengan menyekolahkan anak. Lebih jauh lagi, program pemberdayaan ekonomi keluarga yang digagas Ibu Irmawaty merupakan strategi yang lebih fundamental, yaitu dengan meningkatkan kapasitas keluarga sebagai investor utama modal manusia anak.

Ketika kapasitas ekonomi keluarga membaik, mereka tidak hanya mampu membiayai pendidikan untuk saat ini, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berinvestasi secara berkelanjutan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain intervensi material, upaya pembinaan dan penyuluhan kepada orang tua serta pelibatan tokoh masyarakat yang ditekankan oleh Bapak Ramadin dan Ibu Irmawaty, bertujuan untuk memperkuat persepsi tentang manfaat (*benefit*) dari investasi pendidikan. Program ini berusaha menyadarkan keluarga bahwa manfaat pendidikan sebagai modal masa depan—seperti peluang kerja yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan sangatlah nyata dan jauh lebih berharga dibandingkan keuntungan jangka pendek dari putus sekolah. Dengan

demikian, Dinas Sosial tidak hanya bertindak sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membangun pemahaman dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan modal manusia.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan anak putus sekolah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Simeulue telah menyentuh aspek-aspek kunci yang dijelaskan dalam Human Capital Theory. Problem putus sekolah ditangani tidak hanya sebagai persoalan karitatif semata, melainkan sebagai masalah pembangunan modal manusia (human capital development). Strategi yang komprehensif, mulai dari mengurangi *cost*, meningkatkan kapasitas investor (keluarga), hingga memperbaiki persepsi *benefit*, menunjukkan pendekatan yang holistik. Keberhasilan jangka panjang dari strategi ini sangat bergantung pada sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan keluarga, untuk memastikan bahwa setiap anak di Kecamatan Alafan dapat menjadi modal manusia yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan.

4.1.2 Analisis Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Simeulue memainkan peran multi-dimensional dan terintegrasi dalam menangani masalah anak putus sekolah di Kecamatan Alafan. Peran ini tidak terbatas pada pemberian bantuan sosial yang bersifat karitatif, tetapi telah berkembang menjadi suatu model intervensi yang komprehensif. Secara operasional, peran tersebut dapat dipetakan ke dalam empat fungsi utama. Pertama, fungsi preventif dan assesmen, yang diwujudkan melalui kegiatan identifikasi, pendataan, dan verifikasi anak putus sekolah yang melibatkan aparatur kecamatan dan gampong, seperti yang dijelaskan oleh Bapak T. Riduan dan Bapak Radisal. Kedua, fungsi finansial dan material, berupa penyaluran bantuan langsung seperti beasiswa, bantuan biaya pendidikan, PKH, dan BPNT untuk mengatasi hambatan ekonomi inmediat. Ketiga, fungsi pemberdayaan dan penguatan kapasitas, melalui program pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil bagi orang tua, seperti yang menjadi fokus kerja Ibu Irmawaty. Keempat, fungsi advokasi dan kolaborasi, yang mencakup pembinaan sosial, penyuluhan kepada orang tua, bimbingan bagi anak, serta membangun kemitraan strategis dengan Dinas Pendidikan, sekolah, lembaga non-pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendukung.

Berdasarkan kajian diatas sebagaimana teori Human Capital Theory (Teori Modal Manusia) memberikan lensa teoretis yang tepat untuk menganalisis akar masalah dan strategi penanganan yang diterapkan. Teori ini beranggapan bahwa pendidikan adalah investasi yang menghasilkan peningkatan produktivitas dan pendapatan individu di masa depan (Becker, 1964). Dalam konteks Kecamatan Alafan, tingginya angka putus sekolah merepresentasikan gagalnya proses investasi dalam modal manusia ini. Sebagaimana diuraikan oleh Bapak Ramadin, faktor ekonomi menjadi pendorong utama, yang dalam kerangka Human Capital Theory dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari sebuah kalkulasi biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) yang timpang di tingkat rumah tangga. Keluarga memandang biaya langsung (sekolah, transportasi) dan biaya oportunitas (*opportunity cost*), yaitu pendapatan yang hilang karena anak tidak bekerja, lebih besar daripada manfaat ekonomi jangka panjang dari pendidikan yang bersifat abstrak dan tertunda (*delayed gratification*).

Melalui lensa Human Capital Theory, seluruh program Dinas Sosial dapat dipandang sebagai intervensi sistematis untuk memperbaiki kalkulasi biaya-manfaat yang tidak seimbang tersebut dan memastikan kelangsungan investasi pada modal manusia. Pertama, program bantuan finansial langsung seperti beasiswa, PKH, dan BPNT bertindak sebagai subsidi investasi modal manusia. Program-program ini secara langsung berupaya menurunkan komponen "biaya" (*cost*) dalam persamaan investasi keluarga. Dengan meringankan beban finansial, diharapkan keluarga akan

memilih untuk melanjutkan investasi mereka dengan menyekolahkan anak, karena hambatan terbesarnya telah berkurang.

Kedua, program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil, seperti yang digagas Ibu Irmawaty, merupakan strategi yang lebih mendasar dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya memberi "ikan", tetapi juga "kail". Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga sebagai investor utama dari modal manusia anak. Ketika pendapatan keluarga stabil dan meningkat, mereka tidak hanya mampu membiayai pendidikan untuk saat ini, tetapi juga memiliki kemampuan finansial untuk berinvestasi secara berkelanjutan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga membentuk siklus peningkatan modal manusia yang positif.

Ketiga, kegiatan pembinaan sosial, penyuluhan kepada orang tua, dan bimbingan kepada anak yang disebutkan oleh Bapak Ramadin dan Bapak Radisal, ditujukan untuk memperkuat persepsi tentang "manfaat" (*benefit*) dari investasi pendidikan. Intervensi ini berusaha mengoreksi persepsi sempit yang hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek dengan menyadarkan keluarga bahwa pendidikan adalah "modal" yang nilainya jauh lebih besar di masa depan. Dengan kata lain, Dinas Sosial berusaha meningkatkan nilai diskonto dari manfaat pendidikan di mata keluarga, sehingga manfaat jangka panjang itu dirasakan lebih nyata dan menarik daripada keuntungan sesaat dari putus sekolah.

Penekanan pada kolaborasi oleh semua narasumber, terutama Bapak T. Riduan dan Bapak Radisal, menegaskan bahwa pembangunan modal manusia bukanlah tanggung jawab satu instansi saja. Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan menjamin kualitas "produk" pendidikan; kemitraan dengan sekolah memastikan penanganan yang tepat sasaran; dan pelibatan tokoh masyarakat serta lembaga non-pemerintah menciptakan jejaring pengaman sosial (*social safety net*) dan lingkungan normatif yang mendukung nilai-nilai pendidikan. Dalam perspektif Human Capital Theory, kolaborasi ini memperkuat ekosistem yang memungkinkan investasi modal manusia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Secara keseluruhan, peran Dinas Sosial dalam penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Alafan telah bergerak dari pendekatan bantuan konvensional menuju pendekatan pembangunan modal manusia (*human capital development*) yang holistik. Strategi yang diterapkan secara paralel yaitu mengurangi cost, meningkatkan kapasitas investor (keluarga), dan memperbaiki persepsi benefit menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap akar masalah. Dengan demikian, Dinas Sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyalur bantuan, tetapi telah bertransformasi menjadi fasilitator dan katalisator bagi pertumbuhan modal manusia di Kabupaten Simeulue. Keberlanjutan upaya ini sangat bergantung pada konsistensi program dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, guna memutus siklus kemiskinan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

4.1.3 Analisis Upaya yang dilakukan dinas sosial untuk mencegah anak Anak Putus Sekolah di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue

Permasalahan anak putus sekolah di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Simeulue menunjukkan bahwa terdapat berbagai upaya yang dilakukan dalam mencegah anak putus sekolah, baik melalui pendekatan struktural berupa bantuan sosial maupun pendekatan kultural melalui penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya tersebut mencakup pendataan dan identifikasi, pemberian bantuan sosial, pemberdayaan keluarga, penyuluhan sosial, serta kolaborasi lintas sektor. Pertama, dari sisi pendataan dan identifikasi, Dinas Sosial berperan melakukan verifikasi terhadap anak-anak yang berisiko putus sekolah. Langkah ini penting karena data yang akurat menjadi dasar perumusan kebijakan dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2016) bahwa kebijakan berbasis data dapat menghasilkan efektivitas program yang lebih tinggi, terutama dalam penanganan masalah sosial seperti pendidikan.

Kedua, dalam aspek dukungan ekonomi, Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun beasiswa. Bentuk bantuan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga miskin sehingga anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pandangan Tilaar (2009) bahwa faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab utama anak putus sekolah di Indonesia.

Ketiga, pemberdayaan keluarga melalui pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil dilakukan agar keluarga memiliki kemandirian ekonomi. Upaya ini penting dalam mencegah anak berhenti sekolah karena orang tua mampu membiayai kebutuhan pendidikan secara berkelanjutan. Strategi pemberdayaan ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan jangka pendek, tetapi juga memiliki kapasitas ekonomi untuk mendukung masa depan anak-anak mereka (Todaro & Smith, 2015).

Keempat, penyuluhan dan pembinaan sosial kepada orang tua dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Banyak kasus anak putus sekolah bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh pola pikir orang tua yang lebih mengutamakan anak bekerja dibandingkan bersekolah. Oleh karena itu, penyuluhan menjadi bagian penting untuk mengubah pola pikir tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Bourdieu (1986) tentang pentingnya modal budaya, di mana nilai, norma, dan persepsi dalam masyarakat berpengaruh terhadap keputusan pendidikan.

Kelima, kolaborasi lintas sektor antara Dinas Sosial dengan Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan, gampong, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial menjadi salah satu faktor penting. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kerja sama semua elemen. Menurut Putnam (1993), modal sosial yang dibangun melalui jaringan kolaborasi dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan. Jika dikaitkan dengan Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) yang dikembangkan oleh Schultz (1961) dan Becker (1964), upaya yang dilakukan Dinas Sosial ini dapat dipahami sebagai bentuk investasi jangka panjang pada pendidikan. Teori ini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga investasi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas ekonomi di masa depan.

Upaya Dinas Sosial dalam memberikan bantuan sosial, mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga, serta melakukan penyuluhan dan pendampingan merupakan bentuk nyata investasi pada modal manusia. Dengan memastikan anak-anak tetap bersekolah, maka keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas mereka akan meningkat. Pada gilirannya, hal ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat memperlihatkan adanya dukungan modal sosial yang memperkuat modal manusia. Hal ini sejalan dengan konsep integratif dalam Human Capital Theory, di mana pendidikan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan individu sekaligus pembangunan kolektif. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa peran Dinas Sosial dalam mencegah anak putus sekolah di Kecamatan Alafan

Kabupaten Simeulue telah sejalan dengan paradigma Human Capital Theory. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan menghasilkan generasi dengan kualitas sumber daya manusia lebih baik, sehingga mampu memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

5. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab anak putus sekolah di Kecamatan Alafan adalah kombinasi dari faktor ekonomi, sosial budaya, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta lingkungan dan motivasi anak.
2. Peran Dinas Sosial bersifat komprehensif, mencakup aspek bantuan material, pemberdayaan, pembinaan, dan kolaborasi lintas sektor.
3. Upaya pencegahan dilakukan melalui pendataan, bantuan sosial, pemberdayaan keluarga, penyuluhan, dan kolaborasi yang terintegrasi.

Saran

1. Saran Praktis: Dinas Sosial perlu meningkatkan kualitas pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, dan memperkuat pendampingan psiko-sosial bagi anak dan keluarga.
2. Saran Teoritis: Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur efektivitas jangka panjang program pemberdayaan ekonomi keluarga terhadap penurunan angka putus sekolah, serta mengeksplorasi model kolaborasi yang paling efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam konteks yang serupa.

UCAPAN TERIMA KASIH (opsional)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Simeulue dan seluruh informan serta responden yang telah berpartisipasi dan mendukung kelancaran penelitian ini.

REFERENSI

- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). Greenwood.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). *The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth*. MIT Press.
- OECD. (2021). *The State of School Education: One Year into the COVID Pandemic*. OECD Publishing.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Edisi 1). RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Cetakan ke-2, Edisi ke-3). Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (Edisi ke-12). Pearson.
- Alifa, V. N. (2023). Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Putus Sekolah di Indonesia Pada Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 3(2), 175–182.

- Aminah, W., & Chalid, I. (2023). Anak Putus Sekolah: Kajian Antropologi Pendidikan pada Keluarga Nelayan di Aceh Utara. *Aceh Anthropological Journal*, 7(1), 13-25.
- Budi Lestari, A. Y., Kurniawan, F., & Bayu Ardi, R. (2020). Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 4(2), 299–308.
- Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*, 4(13), 35-42.
- Riswan, A., Evelin, K., & Lumintang, J. (2022). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Journal Ilmiah Society*, 2(1), 1–10.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1-17.
- Uncup Supriatna. (2023). Inisiatif Partisipasi Sosial dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Kolaborasi Lembaga Pemerintah, LSM, Masyarakat). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 15(1), 88-102.
- Septianto, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Era Pandemi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 2(1), 45-56.